



Transfer Concept (Bahasa Version)

“Low Carbon City”, Wakatobi, Indonesia

The project is implemented by Wakatobi based on the best practice from Muangklang, Thailand. For further information as well as the English short version of this document, please visit:

www.DELGOSEA.eu

You can also get in touch with the local contact for this project:

Abdul Manan, manan_1961@yahoo.com

The content of this document is the responsibility of the respective author.
Version 2011.



This project is co-funded by the European Union.

A Project implemented by the consortium: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Thailand Environment Institute (TEI), Local Government Development Foundation Inc. (LOGODEF), United Cities and Local Governments for Asia and Pacific (UCLG-ASPAC), Association of Indonesian Regency Governments (APKASI), Association of Cities of Vietnam (ACVN), and National League of Communes/Sangkats of the Kingdom of Cambodia (NLC/S).

Disain Proyek Replikasi BP

Pemeliharaan Kejernihan Air Laut Melalui Pengelolaan Sampah Kota Yang Baik di Kabupaten Wakatobi

1. Latar Belakang

Kabupaten Wakatobi adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang kaya akan sumber daya alam baik di daratan maupun di lautan. Ditetapkannya Kabupaten Wakatobi melalui SK Menhut No. 393/Kpts-V/1996, sebagai Taman Nasional (*National Protected Area*), dan sebagai Taman Nasional Laut (*National Marine Park*) berdasarkan SK Menhut No.756/Kpts-II/2002 merupakan bukti nyata bahwa Kabupaten Wakatobi memiliki kekayaan alam yang perlu dijaga dan dilindungi keberlangsungannya.

Kepulauan Tukang Besi atau yang sekarang dikenal dengan Kepulauan Wakatobi, merupakan singkatan dari empat nama Kecamatan di kepulauan tersebut yakni **W**angi-Wangi, **K**aledupa, **T**omia, dan **B**inongko. Kepulauan ini terletak di sebelah Timur Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara yang membentang dari Utara ke Selatan diantara 5.00° – 6.25° LS (sepanjang \pm 160 km) dan 123.34° – 124.64° BT (sepanjang \pm 120 km). Batas wilayah Kabupaten Wakatobi sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Buton
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buton dan Muna

Seiring dengan perubahan politik nasional yang menekankan otonomi dan desentralisasi kewenangan, Wakatobi berdiri sebagai daerah otonom baru melalui UU No 29/2003 (tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara). Kondisi ini tentunya akan menempatkan Wakatobi sebagai daerah otonom sekaligus daerah konservasi laut (Kabupaten Konservasi) baik dalam konteks ruang wilayah Propinsi Sulawesi

Tenggara maupun dalam skala yang lebih luas.

Kabupaten Wakatobi merupakan gugusan *pulau-pulau kecil* bahkan dapat dikatakan ***gugusan pulau sangat kecil***, berjumlah 48 buah. Luas Kabupaten Wakatobi adalah 13.990 km², terdiri atas luas daratan 457 km² dan luas perairan 13.533 km² dan keliling 327 km. Dari luas tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Wakatobi sebagian besar terdiri dari perairan laut yakni sekitar 97%, sedangkan luas daratnya hanya mencapai 3 %.

Persoalan lingkungan menjadi sorotan dan isu besar saat ini di dunia. Sebab dampak kerusakan lingkungan sudah sangat nyata. Salah satunya adalah dampak pemanasan global (*Global Warming*) yang berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan manusia. Oleh karena itu berbagai pihak dituntut untuk lebih peka dan peduli pada lingkungan. Dari sisi pemerintah dituntut untuk memberikan kebijakan yang tidak merugikan lingkungan, sedangkan dari sektor swasta diminta untuk tidak mengeksploitasi lingkungan secara tidak bertanggungjawab yang hanya merusak lingkungan.

Keanekaragaman Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang terdapat di Kabupaten Wakatobi adalah sebuah anugerah yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya sebagai potensi daerah yang merupakan modal bagi pembangunan. Pengelolaan potensi tersebut harus dilakukan secara arif dan bijaksana atau dengan kata lain memperhatikan nilai efisiensi sehingga kebutuhan generasi yang akan datang dapat terakomodasi.

Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Wakatobi berupaya berbenah diri melalui kegiatan pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara lahir dan batin. Ketersediaan sumber daya alam yang terbatas serta tidak merata baik kualitas maupun kuantitasnya, merupakan faktor pengendali utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) merupakan sebuah konsep keseimbangan yang mengatur interaksi elemen-elemen

sumber daya alam dengan variabel pembangunan guna menuju pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) di Kabupaten Wakatobi.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka tumpuan harus diletakan pada keseimbangan daya dukung alam, aktivitas penduduk dan lingkungan sehingga terbentuk suatu ekosistem yang saling menguntungkan. Agar keseimbangan ini dapat terus terpantau, maka diperlukan sebuah kompilasi data yang komprehensif yang memuat tentang daya dukung lingkungan terhadap aktivitas manusia.

Dalam kerangka mendefinisikan lingkungan hidup Kabupaten Wakatobi agar terintegrasi dalam proses manajemen pembangunan daerah, regional, nasional, dan internasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, maka upaya menemukenali dan menemukukan isu-isu lingkungan hidup menjadi penting.

Sebagai wilayah gugusan Pulau-Pulau Kecil (PPK), Kabupaten Wakatobi memiliki karakteristik

- Memiliki daerah tangkapan air yang sangat terbatas, sehingga ketersediaan air tawar cenderung terbatas pula, bahkan di beberapa tempat air tawar seringkali harus didatangkan dari daerah di sekitarnya. Kondisi ini diperparah oleh tingginya eksploitasi nilai *tangibel* hutan, baik untuk kegiatan permukiman maupun untuk pembukaan lahan perkebunan masyarakat. Kegiatan eksploitasi hutan tersebut berdampak pada meningkatnya kecenderungan intrusi air laut.
- Penurunan sumberdaya laut dan pantai. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya permintaan makanan yang menyebabkan kelebihan, pengrusakan serta penangkapan ikan dan biota lainnya secara ilegal (*over fishing, destructive fishing, serta illegal fishing*), hal ini jelas memberikan kontribusi kepada terjadinya penurunan sumberdaya laut dan pantai. Adanya keterbatasan material yang tidak dimiliki Wakatobi, khususnya bahan galian C (pasir) sebagai material bangunan, di sisi lain kebutuhan pasir semakin tinggi, baik untuk pembangunan fasilitas publik maupun kebutuhan masyarakat sendiri.

Di beberapa tempat sudah menimbulkan masalah sosial dan ekologis. Masalah sosial disebabkan oleh konflik pemanfaatan pasir oleh masyarakat. Sedangkan masalah ekologis, penambangan pasir telah berkontribusi pada peristiwa abrasi pantai karena hilangnya tanaman mangrove di daerah pesisir.

- Pulau-pulau kecil diketahui memiliki sejumlah besar spesies endemik dan keanekaragaman hayati tipikal yang bernilai tinggi. Apabila terjadi perubahan lingkungan pada daerah tersebut, maka akan sangat mengancam keberadaan spesies-spesies tadi.
- Sebagai daerah pesisir dan maritim, masyarakat Wakatobi sering memanfaatkan jasa air laut sebagai reservoir sampah. Sebagai daerah maritim, Wakatobi merupakan jalur lintasan pelayaran yang ramai, sehingga dimungkinkan limpahan limbah dari sisa-sisa bahan bakar (efluen) kapal laut masuk ke badan perairan. Kedua masalah tersebut mengancam keberlangsungan sumberdaya laut Wakatobi.
- Krisis pemanfaatan lahan. Kabupaten Wakatobi sebagai daerah Pulau-Pulau Kecil (PPK) sangat rentan dengan persoalan lahan, baik untuk peruntukan pemukiman, perkantoran, pertanian, maupun yang lainnya. Dengan demikian prinsip kehati-hatian dalam penataan dan pemanfaatan lahan sangat dibutuhkan.

Program Low Carbon City dari Kota Muangklang, Filipina yang direplikasi ke Kabupaten Wakatobi bisa menjadi langkah untuk menyempurnakan program pelestarian kejernihan air yang sudah ada sebelumnya.

2. Strategi Implementasi

Penyesuaian BP Low Carbon City Muangklang dengan Wakatobi

-

Desain proyek replikasi BP ini dibangun dengan menyesuaikan dengan keadaan

politik, ekonomi, sosial dan budaya setempat. Isu low carbon city dari Muangklang bila direplikasi mentah-mentah sesungguhnya relatif tidak pas. Mengingat daerah wakatobi yang didominasi oleh lautan (97%) dan hanya 3% daratan. Namun setelah menganalisa kebutuhan dan kondisi lapangan di Wakatobi, low carbon city dari Muang Klang bisa direplikasi dalam bentuk program penjernihan air laut secara berkelanjutan.

Koordinasi Antar Sektor

Dalam pelaksanaan program, terdapat 3 leading sector yang mengawal program ini, yaitu Dinas Pendidikan, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP). Namun berdasar hasil diskusi kelompok pada sosialisasi BP, muncul beberapa stakeholder yang terlibat:

- a. Walikota
- b. Asisten Pembangunan
- c. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Dinas Kelautan dan Perikanan
- e. Dinas Pendidikan
- f. Badan Perencanaan Daerah
- g. Pengusaha daur ulang
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- i. Komite Sekolah
- j. Dewan Pendidikan
- k. Sekolah Adiwiyata
- l. Departemen Agama
- m. Media

Unsur-unsur inilah yang membentuk POKJA (working group) yang diberi Surat Keputusan oleh Walikota Wakatobi sebagai kekuatan hukum untuk melaksanakan program.

Keterlibatan Masyarakat

Penerapan BP Low Carbon City di Wakatobi akan melibatkan warga melalui:

1. Orang tua dan murid
2. Masyarakat melalui komunitas warga
3. Aparat pemerintah melalui kantor pemerintah

3. Nama Program

Pemeliharaan Kejernihan Air Laut Melalui Pengelolaan Sampah Kota Yang Baik.

4. Tujuan dan Output Program

Tujuan Program

Terpeliharanya kejernihan air laut secara berkelanjutan.

Keluaran 1

Meningkatnya kesadaran *stakeholder* terhadap pengelolaan sampah

Indikator Keberhasilan

1. 60% dari jumlah rumah tangga melakukan pemilahan sampah
2. Sampah yg telah dipilah dibawa ke TPS
3. Materi pengelolaan sampah terintegrasi kedalam mata pelajaran di TK, SD, SLTP
4. Industri rumah tangga melakukan pemilahan sampah dan membuang sampah pada tempatnya
5. Strategi komunikasi melalui media komunitas

6. Promosi Kesehatan dan penyebarluasan informasi sanitasi kesehatan melalui Penyuluhan/Sosialisasi
7. Dilakukan sosialisasi penggunaan grease trap di perumahan

Kegiatan-kegiatan

1.1 Penysadaran dan peningkatan partisipasi pengolahan sampah di sekolah.

- 1.1.1 Pelibatan siswa untuk ikut memantau sampah di Kanal dan sekitar lingkungan desa.
- 1.1.2 Gerakan Sabtu bersih untuk membersihkan kanal dan lingkungan sekitar sekolah
- 1.1.3 Pembentukan "Bank Sampah" di sekolah.
- 1.1.4 Penysadaran tentang pentingnya pengolahan sampah diintegrasikan pada mata pelajaran yang relevan di sekolah.

1.2 Penysadaran dan peningkatan partisipasi pengolahan sampah di tingkat warga.

- 1.2.1 Warga membuat petunjuk teknis sederhana mengenai sistem pengolahan sampah di lingkungan.
- 1.2.2 Penyuluhan kepada masyarakat tentang sistim pengolahan sampah
- 1.2.3 Bakti sosial setiap hari Sabtu untuk kebersihan lingkungan
- 1.2.4 Kampanye bebas sampah plastik melalui penggunaan kantong belanja yang *reusable*

1.3 Strategi komunikasi melalui media komunitas

- 1.3.1 Penysadaran melalui ceramah dan Khotbah
- 1.3.2 Menciptakan icon dan logo bebas sampah
- 1.3.3 Iklan tv kabel lokal

1.4 Sosialisasi penggunaan grease trap di kawasan perumahan

1.5 Pengadaan bahan penyadaran sanitasi lingkungan:

1.5.1 Pengadaan Baliho "Desa bebas sampah"

1.5.2 Pembuatan Papan Informasi di balai desa.

Keluaran 2.

Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yg memadai di tingkat lingkungan dan di tingkat manajemen kota

Indikator Keberhasilan

1. Minimal tiap desa terdapat TPS 1 unit dengan volume 3 m³ utk sampah organik & unorganik
2. Min. Tiap TPS terdapat 1 gerobak untuk melayani
3. Minimal Tiap desa memiliki 2 unit sampan
4. Tersedianya 1 unit mobil utk sampah kering & basah
5. Tersedianya 1 gerobak sampah di dermaga pelabuhan
6. Tersedia TPS di wilayah pasar
7. Tersedia 1 unit Conveyor Belt di kawasan landfill
8. Tersedia 1 unit traktor sampah di kawasan landfill
9. Tersedia 1 unit compactor di kawasan landfill
10. Tersedia 2 unit Crusher di kawasan landfill

Kegiatan-kegiatan:

1. Pengadaan TPS sebanyak 5 unit di Mola Raya
2. Gerobak sampah sebanyak 10 unit
3. Pengadaan perahu sampah sebanyak 5 sampan
4. Pengadaan 1 unit mobil untuk sampah
5. Pengadaan 1 unit gerobak sampah di pelabuhan mola
6. Pengadaan 1 Unit TPS di Pelabuhan Mola dengan ukuran 2 m³, yang terdiri dari TP sampah organik dan TP sampah anorganik. Terbuat dari drum Plastik.

7. Pengadaan 1 unit TPS mobile yang terdiri dari TP sampah organik dan TP sampah anorganik di wilayah pasar dengan ukuran (5m³). Terbuat dari drum Plastik.
8. Pengadaan Model Grease Trap 2 unit
9. Pengadaan conveyor belt 2 unit
10. Pengadaan traktor 1 unit
11. Pengadaan compactor 1 unit
12. Pengadaan crusher 2 unit

Keluaran 3.

Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui kegiatan pengolahan sampah.

Indikator Keberhasilan

Terselenggaranya pelatihan bagi masyarakat pelaku industri rumah tangga.

Kegiatan-Kegiatan

1. Pelatihan pembuatan E. M
2. Pelatihan pemanfaatan sampah plastik untuk kerajinan.

Keluaran 4.

Berfungsinya pengolahan sampah di tingkat desa dan tingkat kota

Indikator Keberhasilan

1. Adanya gerakan masyarakat yang bersifat kontinyu
2. Adanya Per Des mengenai pengelolaan sampah atau
3. Adanya SK Kepala Desa tentang pengolahan sampah
4. Adanya petugas sampah yang terlatih dalam jumlah yang memadai

Kegiatan-kegiatan

1. Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan
2. Keputusan Kepala Desa terkait pengelolaan sampah
3. Insentif retribusi kepada pedagang Pasar yang memilah sampahnya

4. Pembentukan forum kompos (Komunitas Mitra Pengelolaan Sampah) di tingkat desa.
5. Penempatan petugas yang terlatih dan dalam jumlah yang cukup
6. Penggunaan 2 mobil sampah berbeda untuk sampah organik dan anorganik
7. Penyediaan lokasi yang berbeda untuk sampah organik dan anorganik

Keluaran 5.

Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan

Indikator Keberhasilan

1. 70 % Kepala Rumah Tangga telah memiliki jamban keluarga
2. 70 % Anggota rumah tangga menggunakan jamban keluarga
3. Terbangunan MCK umum ditempat strategis (Pelabuhan 1 Buah dan Pasar sentral 2 Buah)

Kegiatan-kegiatan:

1. Stimulan Pengadaan bahan jamban :
Semen : 6 X 1083 kk
Tegel : 4 X 1083
Besi Beton :5 Btg x 1083
Kloset : 1083
Atap Seng : 6 Lbr x 1083
2. Pendataan jamban keluarga
2 Kl/ Tahun
3. Pemutahiran data penggunaan jamban keluarga
4. Pembangunan MCK Umum di pelabuhan Mola
10 Unit x 24 M2
5. Pembangunan MCK Umum di Pasar Sentral :2 Unit x 24 M2

5. Pendekatan Program dan Kelompok Sasaran

Program ini menggunakan metode partisipatif. Kelompok sasaran program adalah: (1) masyarakat sipil (2) sekolah (3) dunia usaha (4) pemerintah Kabupaten Wakatobi.

6. Manfaat Program

Penerima manfaat program penjernihan air laut ini adalah masyarakat Kabupaten Wakatobi.

7. Waktu Pelaksanaan Program

Program ini berlangsung sejak semester II tahun 2011 hingga 2012.

8. Pelaksana Program

Satuan pelaksana program ini adalah dibawah koordinasi POKJA Kabupaten Wakatobi dengan leading sector Dinas Pendidikan, BPLH dan DKPP Kabupaten Wakatobi.

9. Pendanaan

Jumlah seluruh biaya yang diperlukan untuk program ini adalah Rp. Rp. 685.000.000

Jumlah dana tersebut akan dianggarkan dari APBD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 dan APBD perubahan tahun 2011. Strategi pendanaan dari sumber lain dimungkinkan dengan melakukan kemitraan bersama pihak-pihak lain yang memiliki visi yang sama untuk program

10. Manajemen Resiko

Dalam perjalanan program, tidak menutup kemungkinan akan muncul resiko yang harus diantisipasi pelaksana program. Diantaranya adalah:

1. Anggaran dari APBD yang belum atau terlambat turun, baik saat akan pelaksanaan program ataupun di tengah perjalanan pelaksanaan program.
2. Pelaksana program (Pokja) yang tiba-tiba dipindah ke bagian lain di dinas/ struktur pemerintahan kota yang menyebabkan peran-perannya menjadi tidak maksimal.
3. Penyimpangan substansi dalam pelaksanaan program dari apa yang telah direncanakan dalam konsep.

11. Monitoring dan Evaluasi

Untuk mengantisipasi resiko-resiko yang muncul dan keberlanjutan program ini tim dari Dewan Pendidikan Kota akan melakukan Monev secara rutin dan berkesinambungan dengan panduan modul monev yang dibuat berdasar rancangan hirarki program.

Monitoring dan Evaluasi dari Tim Nasional DELGOSEA juga dipandang penting untuk memastikan program berjalan sebagaimana yang direncanakan. Monev dilakukan 3 bulan sekali dengan tiap-tiap bulan ada laporan pelaksanaan dari Pokja.

12. Dampak dan Keberlanjutan

Program ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi pendidikan lingkungan, kejernihan air laut dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wakatobi.

Adapun keberlanjutan program ini tergantung pada bagaimana implementasi di lapangan. Dengan pendekatan yang tepat, baik saat sosialisasi ataupun

implementasi, koordinasi yang baik antar stakeholder yang terlibat, termasuk bagaimana masyarakat merasa memiliki (ownership) program ini, maka keberlanjutan program merupakan suatu keniscayaan walaupun program telah usai.

13. Penutup

Demikian Desain Program ini kami buat untuk kemajuan dan kebaikan Kabupaten Wakatobi.